



## IEEFA: Target Net Zero Perusahaan Listrik Negara di tahun 2060 Bukan Tanpa Celah Indonesia berada di jalur penurunan emisi yang benar, namun cerita lama batu bara masih hadir

25 Juni (IEEFA Indonesia): Pernyataan terbaru dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mencapai target karbon netral di tahun 2060 perlu ditelisik lebih mendalam karena angka-angka yang dikemukakan tidak semuanya selaras, sebagaimana dikemukakan laporan terakhir dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Penulis laporan, analis keuangan energi IEEFA Erika Hamdi dan Putra Adhiguna memaparkan bahwa bagaimanapun, komitmen dari PLN dan Kementerian ESDM untuk menuju target penurunan emisi jangka panjang patut untuk dipuji. Walaupun terdapat beberapa perkembangan positif dalam pengumuman tersebut, masih ditemukan cukup banyak rencana yang belum selaras dengan inisiatif kebijakan sektor kelistrikan jangka pendek maupun jangka menengah.

Di bulan Mei, PLN mengumumkan ambisinya untuk mencapai target karbon netral di tahun 2060, melengkapi target Paris Agreement 23% Energi Terbarukan di tahun 2025. Hal ini akan diawali dengan rencana *memensiukan* operasi PLTU dimulai dari tahun 2030, secara bertahap hingga fase terakhir di tahun 2056.

“Rencana *net zero* saat ini tidak menggambarkan inisiatif baru untuk *me-reset* arah kebijakan penurunan emisi karbon Indonesia” menurut penulis laporan tersebut, Erika Hamdi.

### Analisis IEEFA mengemukakan beberapa temuan utama:

- 1. Tidak ada rancangan pensiun dini atas pembangkit batu bara di dalam rencana net zero yang dipaparkan.** Rencana tersebut hanya memberikan gambaran rencana *decommissioning* PLTU yang tersambung ke sistem transmisi PLN sesuai dengan umur ekonomis masing-masing pembangkit.
- 2. Sekitar 16 GW kapasitas PLTU batubara baru dari program 35 GW akan tetap masuk ke dalam sistem antara tahun 2021 sampai 2030.** Kementerian ESDM telah menyampaikan instruksi dari Presiden Jokowi bahwa tidak ada penambahan baru PLTU batubara kecuali yang sudah masuk konstruksi atau sudah mendapatkan pendanaan (*financial close*). Dengan begitu, diprediksi 100% dari PLTU batubara milik *Independent Power Producer* (IPP)



akan tetap berjalan, meskipun saat ini terjadi kelebihan pasokan listrik di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera.

3. Tahap pertama dari rencana pensiun 1 GW PLTU oleh PLN di tahun 2030 melibatkan pembangkit yang sudah *sangat tua*, yang umurnya akan mencapai usia 50 sampai 60 tahun di tahun tersebut, dan saat ini beroperasi dengan menggunakan minyak atau gas.
4. 10 dari 12 PLTU “*skala kecil terkendala*” yang ditargetkan untuk pembatalan sebenarnya telah dibatalkan *dua tahun lalu* dalam RUPTL 2019
5. **Terdapat sekitar 6.8 GW rencana baru ‘modifikasi’ atau ‘penundaan’ PLTU yang ditemui dalam DRUPTL 2021.** Hal positif tersebut anehnya tidak disoroti lebih lanjut di dalam pernyataan ESDM maupun PLN, sehingga mengundang pertanyaan mengapa PLN dan Kementerian ESDM memilih untuk membahas 34 pembangkit terkendala yang rencana pembatalan kapasitasnya hanya sebesar 177 MW.
6. Proporsi dari kapasitas terpasang energi baru terbarukan menjadi lebih tinggi dan perkiraan pertumbuhan kebutuhan listrik untuk 10 tahun ke depan akhirnya diturunkan.
7. Cofiring biomassa, PLTA skala besar dan pembangkit listrik panas bumi menjadi pilihan utama untuk mencapai target Paris Agreement di tahun 2025, sementara energi surya dan angin tidaklah menjadi prioritas.
8. **Rencana scenario *net zero* milik Kementerian ESDM dan PLN didasarkan pada asumsi yang berbeda.** Meski keduanya sejalan dalam rencana penurunan kapasitas PLTU batubara, jalur yang direncanakan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu skenario ESDM **mebutuhkan Indonesia untuk membangun industri biomassa yang sanggup menghasilkan sekitar 1,4 milyar ton/tahun biomassa di tahun 2060**, atau sekitar *dua ratus kali lipat* kapasitas biomassa Amerika Serikat, produsen biomassa *wood pellet* terbesar dunia.
9. **Kenaikan *operating profit* PLN di tahun anggaran 2020 sebagian besar adalah hasil dari penurunan pengeluaran bahan bakar, terutama minyak dan gas bumi.** Hal ini terjadi karena penurunan tajam harga minyak bumi karena COVID19, kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga gas bagi PLN, dan juga penurunan volume pemakaian bahan bakar akibat adanya penurunan kebutuhan di tahun 2020.
10. **Metrik keuangan PLN akan tampak sangat berbeda sekiranya PLN menerapkan standar akuntansi baru PSAK 73 untuk *Power Purchase Agreement (PPA)* dan *Energy Sales***



**Contracts (ESC)**, namun mereka dikecualikan atas keharusan tersebut dengan terbitnya POJK no 6/2017.

“PLN akan membukukan laba bersih yang jauh lebih rendah, turun dari Rp.5,9 triliun menjadi Rp.990 milyar di tahun 2020. Dengan pengecualian ini, perlu juga diperhatikan bahwa saat ini **ada kewajiban PLN sebesar Rp.242.9 triliun yang saat ini tidak tercatat dalam pembukuan PLN (*off-balance sheet*)**” kata Erika.

Putra Adhiguna, penulis laporan tersebut menyatakan bahwa ketidakselarasan antara pengumuman ambisi *net zero* yang dibuat oleh PLN dan ESDM menunjukkan bahwa tampaknya rencana *net zero* tersebut masih dalam pembahasan.

“Karena itu, diharapkan adanya perubahan dan penyesuaian seiring dengan meningkatnya perhatian dan pemahaman pemangku kepentingan mengenai imbas dari rencana tersebut”, ia menambahkan.

**IEEFA menyarankan beberapa hal di bawah ini untuk menjadi perhatian bersama:**

- 1. Target yang selaras dan realistis.** Langkah pertama adalah memastikan adanya keselarasan antara perencanaan PLN dan ESDM, dengan mempertimbangkan pemilihan teknologi yang paling tepat untuk digunakan dalam usaha penurunan emisi ini.
- 2. Pertumbuhan kebutuhan batubara dan trend harga menuju tahun 2030.**

“Dengan semakin dominannya penggunaan batubara untuk sektor kelistrikan, maka akan terjadi kenaikan kebutuhan batu bara domestik. Penting bagi para pembangkit kepentingan untuk turut memperhatikan kuota ekspor batubara yang belakangan kerap naik, beserta imbasnya pada harga,” ungkap Putra.

- 3. Apakah potensi energi terbarukan lainnya telah dieksplorasi secara maksimal?**
- 4. Perhatian perlu dipusatkan pada proyek PLTU yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan masih mungkin dibatalkan – terutama PLTU yang BELUM mencapai *financial closure*.** Para pihak terkait harus memastikan adanya kejelasan mengenai definisi ‘deadline’ yang dimaksud– apakah tenggat waktu tersebut untuk memulai pembangunan, mencapai *financial close*, atau untuk memulai operasi pembangkit- dengan mengingat bahwa status ‘masa konstruksi’ dapat memiliki pengertian yang sangat abu-abu. Yang tak kalah penting adalah memastikan adanya kajian kritis yang mempelajari kerugian yang akan terjadi dengan adanya penambahan kapasitas PLTU ke dalam sistem yang telah memiliki kelebihan



pasokan. Terutama dalam kaitannya dengan beban subsidi dan kompensasi pemerintah yang terus bertambah, dengan menggunakan uang dari pajak masyarakat.

“PLN sangat memahami sulitnya untuk keluar dari kontrak perjanjian untuk pembangkit yang sudah mencapai tahap lanjutan dalam pengembangannya. Di sisi lain, pertanyaan kelayakan usaha tentunya akan timbul untuk pembangkit yang telah bertahun-tahun memiliki kontrak namun belum mencapai *financial close*,” ujar Elrika

“Melihat kesulitan yang dihadapi PLN dalam menangani kelebihan kapasitas saat ini, adalah sebuah kesempatan emas bagi PLN, dengan dukungan pemerintah, untuk mempertimbangkan ulang semua pembangkit yang belum mencapai *financial closure*”

**Read the report:** [Putting Indonesia’s Net Zero Ambition into Context](#)

**Media contact:** Paige Nguyen ([pnguyen@ieefa.org](mailto:pnguyen@ieefa.org)) Ph: +61 433 048 877

**Author contact:**

Elrika Hamdi, Energy Finance Analyst ([ehamdi@ieefa.org](mailto:ehamdi@ieefa.org))

Putra Adhiguna, Energy Finance Analyst ([padhiguna@ieefa.org](mailto:padhiguna@ieefa.org))

*Authors are available for interviews and/or background briefings.*

**About IEEFA:** The Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) examines issues related to energy markets, trends and policies. The Institute’s mission is to accelerate the transition to a diverse, sustainable and profitable energy economy. ([www.ieefa.org](http://www.ieefa.org))